



Praktik Promiscuous Powersharing Jokowi Terhadap Prabowo Subianto: Studi Kasus Kebijakan Kementerian Pertahanan Tahun 2019-2022

Glenn Kevin Immanuel¹⁾, Ni Wayan Radita Novi Puspitasari²⁾,
Ahmad Rifki Nurfebriansyah³⁾

Universitas Udayana, Jl. Kampus Bukit Jimbaran, Badung, Indonesia¹⁾
Ural Federal University, Lenin Ave 51, Yekaterinburg, Rusia²⁾
Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia³⁾

Corresponding author: kevinimmanuel@student.unud.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan Kementerian Pertahanan tahun 2019 hingga 2022 yang merupakan akibat dari praktik *promiscuous powersharing* yang dilakukan Jokowi terhadap Prabowo Subianto. Hal ini diawali dengan masuknya Prabowo Subianto kedalam pemerintahan pasca pemilihan presiden tahun 2019 dan mendapatkan kepercayaan sebagai menteri pertahanan. Kebijakan Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dianggap sarat akan kepentingan politik pada pemilihan presiden tahun 2024. Dalam menganalisis masalah ini, peneliti menggunakan teori *promiscuous powersharing* yang diajukan oleh Dan Slater. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Temuan dalam penelitian ini adalah kebijakan Kementerian Pertahanan ditujukan untuk kepentingan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden tahun 2024. Selain itu, penelitian ini juga menemukan konsep terbaru, yaitu *negative promiscuous powersharing* dan *positive promiscuous powersharing*.

Kata kunci: Kementerian Pertahanan, Jokowi, Pilpres 2019, Pilpres 2024, Prabowo Subianto, Promiscuous Powersharing

Abstract

This research explains the policies of the Ministry of Defense from 2019 to 2022 which are the result of Jokowi's promiscuous powersharing practices towards Prabowo Subianto. This began with Prabowo Subianto entering the government after the 2019 presidential election and gaining trust as minister of defense. The policy of the Ministry of Defense led by Prabowo Subianto is considered to be full of political interests in the 2024 presidential election. In analyzing this problem, researchers used the theory of promiscuous powersharing proposed by Dan Slater. The research method used in this research is descriptive analysis with a qualitative research type. The data collection technique used is a literature study. The findings in this research are that the Ministry of Defense's policy is aimed at Prabowo Subianto's interests in the 2024 presidential election. Apart from that, this research also found the latest concepts, namely negative promiscuous powersharing and positive promiscuous powersharing.

Key words: Jokowi, Ministry Of Defence, Prabowo Subianto, Presidential Election 2019, President Election 2024, Promiscuous Powersharing.

PENDAHULUAN

Pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik menteri-menteri baru dalam kabinet periode kedua yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju. Salah satu menteri yang dilantik oleh Presiden Jokowi adalah Prabowo Subianto yang dipercaya untuk memegang jabatan sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Hal ini menimbulkan pro dan kontra di akar rumput (*grass root*). Pro dan kontra yang terjadi di masyarakat akibat dari latar belakang Prabowo Subianto yang merupakan lawan politik Presiden Jokowi pada Pilpres 2019. Selain itu Partai Politik yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, yaitu Partai Gerindra merupakan partai oposisi pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi periode 2014-2019. Selama berlangsungnya Pilpres 2019, terjadi pembelahan agama dan etnis di masyarakat (Pepinsky, 2019).

Menjabatnya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dianggap sebagai proses reduksi kekuatan oposisi, termasuk membangun desain koalisi untuk menjamin akselerasi pemerintahan. Reduksi terhadap oposisi menjadi permasalahan yang cukup krusial dalam negara demokrasi, karena ruang pengawasan pada pemerintah menjadi sedikit (Hakim et al., 2022). Pembagian kekuasaan kepada oposisi menjadi cara yang efektif dalam mengurangi tekanan dari oposisi terhadap pemerintah yang sedang berjalan (Slater & Simmons, 2012).

Jabatan Menteri Pertahanan merupakan jabatan yang cukup strategis diantara jabatan menteri di kementerian-kementerian lainnya. Hal ini karena adanya triumvirat menteri pengganti Presiden apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menhan secara bersama-sama (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Ini berarti jika Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak dapat menjalankan tugas kepresidenan dengan alasan yang sudah disebutkan diatas, maka Menlu Retno Marsudi, Mendagri Tito Karnavian, dan Menhan Prabowo dapat menjadi pelaksana tugas presiden secara bersama-sama.

Dengan posisinya sebagai Menhan, Prabowo Subianto juga sangat menentukan dalam pengambilan kebijakan yang dianggap kontroversial. Walaupun dalam melakukan proses kebijakan harus melalui beberapa tahap yang salah satunya adalah tahapan di Legislatif, namun kenyataannya kebijakan yang diambil oleh Prabowo Subianto dapat dikatakan berjalan mulus ketika masuk ke tahap legislatif. Kebijakan yang cukup kontroversial di masa kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menhan adalah Komponen Cadangan (Komcad) dan anggaran pertahanan.

Jika mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Komcad terdiri atas warganegara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disisipkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Yang menarik adalah selama hampir 20 tahun, amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara tidak dilaksanakan oleh pemerintah, namun secara mendadak masalah Komcad diatur dalam Undang-Undang baru yang bernama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Kebijakan lain yang kontroversial adalah kenaikan pos anggaran Kemenhan dalam APBN Tahun 2022. Berdasarkan Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 dalam Amandemen ke-4 mengamankan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan prioritas anggaran belanja untuk sektor pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari jumlah APBN dan APBD. Hal ini berarti pendidikan menjadi sektor yang paling diprioritaskan, namun kenyataannya anggaran pendidikan kalah besar dengan sektor pertahanan. Berdasarkan APBN 2022, Kemenhan menjadi kementerian atau lembaga dengan Pagu terbesar dengan Rp.134,7 Triliun, diikuti dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebesar Rp.111,0 Triliun, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp.100,9 Triliun, sedangkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi berada di urutan ke-6 dengan Pagu sebesar Rp.73,3 Triliun (APBN 2022).

Dengan pemaparan beberapa permasalahan diatas, penting bagi peneliti untuk melakukan

penelitian mengenai praktik *promiscuous powersharing* yang dilakukan oleh Jokowi terhadap Prabowo Subianto dengan studi kasus kebijakan Kementerian Pertahanan tahun 2019 hingga tahun 2022. Penelitian ini akan menggunakan teori *promiscuous powersharing* yang dikemukakan oleh Dan Slater. Secara garis besar Teori *promiscuous powersharing* dari Dan Slater secara garis besar mengulas tentang praktik demokrasi di negara-negara Asia Tenggara dan Amerika Latin yang pasca kejatuhan rezim otoriter justru menghasilkan praktik pembagian kekuasaan yang mencederai demokrasi itu sendiri.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kasus yang diteliti secara mendalam. Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk melakukan deskripsi, menggali, serta memahami makna yang diberikan banyak individu atau kelompok masyarakat terhadap permasalahan sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2014). Hal ini dilakukan karena penelitian ini hendak menggambarkan dan menjelaskan praktik *promiscuous powersharing* yang dilakukan oleh Jokowi terhadap Prabowo Subianto dalam konteks kebijakan Kementerian Pertahanan. Berdasarkan hal ini, maka metode kualitatif dianggap tepat untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan teori *promiscuous powersharing*. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif kepada pembaca, maka peneliti akan menyajikan data kuantitatif dalam bentuk statistik deskriptif.

Dalam mencari dan mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik studi literatur dan analisis dokumen. Teknik studi literatur digunakan dalam rangka menggali data dari sumber-sumber penelitian yang terkait dengan penelitian ini yang sudah dilakukan sebelumnya. Teknik studi literatur dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat fenomena secara lebih mendalam dengan cara melakukan eksplorasi data yang merujuk pada buku-buku, majalah, jurnal dan jenis literatur lainnya. Teknik ini sangat penting dalam penelitian kualitatif dalam rangka mencari informasi dan data sebanyak mungkin dari berbagai literatur, sehingga penelitian ini dapat menyajikan analisis yang komprehensif. Selain itu dengan menggunakan studi pustaka penulis dapat dipermudah dalam mencari informasi tentang teknik-teknik penelitian yang dianggap berguna bagi penelitian, sehingga penelitian ini bukanlah duplikasi.

Kemudian teknik lainnya yang digunakan adalah analisis dokumen. Hal ini bertujuan untuk mendalami kebijakan Kementerian Pertahanan. Teknik ini akan memudahkan peneliti dalam mencari informasi dan sumber guna memperkaya penelitian ini (Guba & Lincoln, 1989). Objek dokumen yang hendak dianalisis dalam penelitian ini adalah dokumen mengenai kebijakan Kementerian Pertahanan, seperti Buku Putih Pertahanan Indonesia, dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 Prabowo Subianto bertemu dengan presiden terpilih, Jokowi di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus pada 13 Juli 2019. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama antara Prabowo Subianto dan Jokowi usai Pilpres 2019 berlangsung. Dalam pertemuan itu, Prabowo Subianto juga sekaligus memberikan ucapan atas terpilihnya Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Hal ini dianggap penting untuk menyatukan kedua kubu yang terpecah akibat polarisasi yang terjadi selama Pilpres 2019 berlangsung. Pertemuan ini menuai berbagai pujian dari beberapa tokoh yang salah satunya adalah Jusuf Kalla yang menyebutkan bahwa pertemuan Prabowo Subianto dan Jokowi mendamaikan situasi politik bangsa pasca Pilpres 2019 (CNN Indonesia, 2019).

Tiga bulan pasca pertemuan Prabowo Subianto dan Jokowi di stasiun MRT Lebak Bulus, Jokowi memanggil calon menteri ke Istana Kepresidenan. Salah satu yang dipanggil ke istana adalah Prabowo Subianto. Jokowi meminta Prabowo Subianto untuk membantu di bidang pertahanan. Tepat tanggal 23 Oktober 2019, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P/Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Periode 2019-2024, Prabowo Subianto dilantik sebagai Menhan di Istana Merdeka, Jakarta.

Prabowo bersama 33 orang lain diambil sumpahnya oleh Presiden Joko Widodo sebagai pejabat di Kabinet Indonesia Maju.

Pelantikan Prabowo Subianto oleh Jokowi sebagai Menhan menimbulkan reaksi pro dan kontra dari masyarakat. Reaksi demikian merupakan hal yang lumrah, karena sebagian masyarakat menganggap bahwa dengan dijadikannya Prabowo Subianto sebagai Menhan dapat mempersatukan masyarakat yang selama ini mengalami polarisasi akibat Pilpres 2019. Sebagian lain menganggap masuknya Prabowo Subianto menjadi bagian dari koalisi pemerintah menjadikan menurunnya kualitas oposisi yang seharusnya berfungsi sebagai *check and balances*. Negara demokrasi dengan oposisi yang tidak dapat diidentifikasi merupakan sebuah paradoks dan problematik (Slater, 2018).

Dalam membentuk kabinet, Jokowi cenderung memiliki pola mengarah kepada *model policy-model coalitions*. Pola ini merupakan pembentukan koalisi yang dimana koalisi dibentuk berdasarkan prefensi tujuan kebijakan yang akan direalisasikan, bukan berdasarkan prefensi ideologi maupun visi politik. Pembentukan kabinet dengan pola seperti ini akan menyebabkan terbentuknya pragmatisme koalisi dan hanya ditujukan kepada hasrat politik jangka pendek (Hannan & Busahwi, 2021). Kemudian dalam tataran kabinet koalisi ditandai dengan adanya praktik berebut kursi kementerian yang berimplikasi pada praktik penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dalam perspektif teori Teori *promiscuous powersharing* yang dikemukakan oleh Dan Slater (2012) menyatakan bahwa pembagian kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah dan partai-partai yang beroposisi pada saat pemilu akan membentuk suatu pemerintahan yang inklusif namun akan menuju kepada demokrasi kolusi karena terdapat pembagian kekuasaan yang bebas didalamnya. Tindakan pembagian kekuasaan yang bebas menyebabkan cideranya demokrasi, sehingga nilai-nilai demokrasi yang didalamnya terdapat perbedaan justru menjadi seragam. Lebih jauh Grzymala-Busse (2007) mencontohkan pengalaman negara-negara di Eropa Timur yang melakukan *praktik promiscuous powersharing* mengakibatkan terkurasnya sumberdaya negara untuk mengembalikan modal partai politik dalam proses pemilu pada waktu sebelumnya. Dan Slater menggunakan istilah "*victory*" untuk menyebut partai yang mendukung presiden saat pemilu, sedangkan partai yang berseberangan dan kemudian pasca pemilu berbalik mendukung disebut sebagai kelompok "*reciprocity*".

Selain itu terdapat pengalaman mengenai *promiscuous powersharing* yang terjadi di Indonesia dan Bolivia. Dan Slater dan Erica Simmons menemukan bahwa elit partai yang ada di Indonesia bersatu untuk membentuk koalisi pemerintahan yang inklusif. Stabilitas demokrasi di suatu negara seharusnya tidak memerlukan praktik kolusi dari *promiscuous powersharing* seperti yang terjadi di Indonesia dan Bolivia. Alih-alih untuk menjaga stabilitas demokrasi, koalisi yang dilakukan oleh elit partai politik akan berujung pada kejatuhan para elit tersebut, memicu reformasi dalam proses pemilu, kesepakatan para pemilih, dan menimbulkan serangan dari rakyat yang dapat menjerumuskan sistem politik kembali kepada kondisi yang tidak pasti seperti yang terjadi di Bolivia atau yang akan terjadi seperti di Indonesia apabila para elit di Indonesia masih melakukan praktik *promiscuous powersharing* (Slater & Simmons, 2012).

Praktik *promiscuous powersharing* akan berdampak pada kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, jika dilihat dari kacamata atau konteks kebijakan. Hal ini terjadi karena adanya *bergaining* kepentingan politik dan ekonomi antara eksekutif dan legislatif dalam proses penetapan kebijakan. Proses penetapan kebijakan ternyata mengakomodir kepentingan politik dan ekonomi eksekutif dan legislatif. Relasi antara eksekutif dan legislatif terjadi akibat dari komunikasi yang baik diantara keduanya yang tercermin dari perumusan kebijakannya (Agustang, 2023). Perumusan kebijakan seharusnya memperhatikan aspirasi rakyat yang semakin berkembang, bukan hanya mementingkan kepentingan elit semata (Harahap et al., 2023).

Anggaran Kementerian sebagai bentuk *Promiscuous Powersharing*

Kementerian Pertahanan merupakan salah satu lembaga negara yang diberikan mandat untuk mengurus bidang pertahanan. Sebagai unsur yang melaksanakan tugas pemerintah di

bidang pertahanan, Kementerian Pertahanan memiliki tugas pokok berupa perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi, perencanaan, potensi dan kekuatan pertahanan.

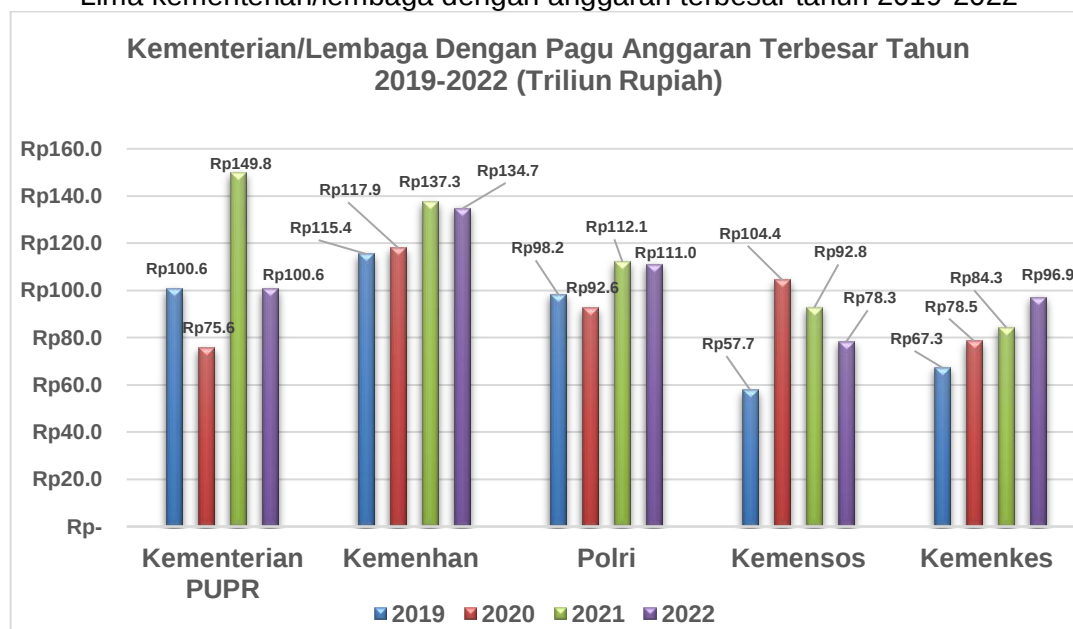
Grafik 1.
Pagu indikatif Kementerian Pertahanan Tahun 2019-2022



Sumber: Diolah dari APBN 2019-2022

Dalam rentang waktu tahun 2019-2022 Kementerian Pertahanan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah pagu anggaran tertinggi dicapai pada tahun 2021 dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp.137,3 Triliun dan terendah pada tahun 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp.115,4 Triliun. Alokasi anggaran Kementerian Pertahanan memiliki tren naik dari tahun ke tahun. Jika dirata-rata dari tahun 2019 hingga tahun 2022, anggaran Kementerian Pertahanan mengalami kenaikan sebesar 5,58% per tahun. Dengan rata-rata kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan sebesar 5,58% per tahun.

Grafik 2
Lima kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar tahun 2019-2022



Sumber: Diolah dari APBN 2019-2022

Kementerian Pertahanan tercatat tiga kali mendapatkan alokasi anggaran APBN tertinggi melampaui kementerian/lembaga lainnya. Pada tahun 2019, 2020 dan 2022, Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran masing-masing sebesar Rp.115,4 Triliun, Rp.117,9 Triliun dan Rp.137,3 Triliun. Anggaran ini menempatkan Kementerian Pertahanan pada tahun-tahun tersebut pada urutan pertama dengan kementerian/lembaga dengan pagu anggaran terbesar. Hanya pada tahun 2021, Kementerian Pertahanan yang memiliki anggaran sebesar Rp.137,3 Triliun berada di urutan kedua setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menduduki urutan pertama dengan anggaran sebesar Rp.149,8 Triliun.

Anggaran Kementerian Pertahanan naik secara signifikan memiliki keterkaitan dengan Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan. Berkaca pada pengalaman Pilpres 2019, Prabowo Subianto yang saat itu merupakan lawan politik dari Joko Widodo mengeluarkan pernyataan tentang anggaran pertahanan yang kecil. Setelah Pilpres 2019, dimana Jokowi melantik Prabowo Subianto sebagai Menhan, Prabowo Subianto menginginkan apa yang telah disampaikan pada Pilpres 2019 terealisasi pada masa kepemimpinannya. Hal ini dilakukan oleh Prabowo Subianto untuk menjaga reputasinya sebagai Menhan dan Ketua Umum Partai Gerindra yang merupakan partai ketiga terbesar yang ada di Indonesia. Prabowo Subianto juga ingin menjaga reputasi Partai Gerindra, yang dimana Partai Gerindra merupakan kelompok *reciprocity*.

Prabowo Subianto sebagai menhan menggunakan otoritasnya untuk menjaga reputasi dan meningkatkan elektabilitas dengan meningkatkan anggaran Kementerian Pertahanan. Anggaran menjadi salah satu kebijakan yang sangat mungkin dimainkan oleh Prabowo Subianto mengingat kritiknya terhadap Joko Widodo pada masa pemerintahan tahun 2014-2019. Salah satu isu yang paling kontroversial adalah saat Prabowo Subianto mewacanakan tentang anggaran Rp. 1.700 triliun untuk pembelian alutsista yang disampaikan Prabowo Subianto dalam podcast Deddy Corbuzier pada tahun 2021. Ini tentu memperlihatkan usaha Prabowo Subianto untuk menjadikan anggaran Kementerian Pertahanan sebagai “senjata” untuk kampanye di Pilpres 2024, mengingat Prabowo Subianto merupakan sosok yang memiliki peluang terbesar untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menggunakan kekuasaannya untuk meloloskan kebijakan anggaran Kementerian Pertahanan lewat Partai Gerindra. Hal ini sangat mungkin dilakukan mengingat Partai Gerindra memiliki 78 anggota yang duduk di kursi DPR yang menempatkan Partai Gerindra memiliki posisi tiga dalam jumlah kursi partai di DPR. Dukungan Partai Gerindra dalam menentukan anggaran Kementerian Pertahanan dibuktikan dengan respon-respon positif mengenai anggaran Kementerian Pertahanan ketika Prabowo Subianto mengajukan anggaran pertahanan ke DPR. Hal ini menunjukkan adanya hubungan patron klien antara Prabowo Subianto sebagai Menhan dan Ketua Umum Partai Gerindra yang ada di parlemen. Hal ini terjadi akibat dari terdapat satu pihak yang memiliki jabatan yang lebih tinggi diantara pihak lainnya yang memiliki jabatan lebih rendah.

Jika lebih lanjut dilihat bahwa Partai Gerindra yang masuk dalam koalisi pemerintah menambah kekuatan bagi Prabowo Subianto dalam usaha untuk mencapai anggaran Kementerian Pertahanan yang sesuai dengan yang diajukan oleh Pemerintah. Jika dilihat, total kursi yang dimiliki oleh koalisi adalah sebanyak 575 kursi yang terdiri dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PAN, PKB, dan PPP. Hubungan baik yang terjadi antara Prabowo Subianto melalui Partai Gerindra dengan partai-partai koalisi pemerintahan membuat semakin mudahnya anggaran Kementerian Pertahanan untuk lolos di tahapan legislatif.

Kemudian jika dilihat lebih jauh komisi di DPR yang memiliki peran dalam penetapan anggaran Kementerian Pertahanan adalah komisi I terhadap komisi I. Komisi I sangat berperan karena Komisi I DPR memiliki mitra yang salah satunya adalah Kementerian Pertahanan. Komisi I memiliki anggota sebanyak 47 orang dan sebanyak 43 orang berasal dari partai-partai yang berkoalisi dengan pemerintah. Pembahasan yang dilakukan oleh komisi I dan Kementerian Pertahanan mengenai anggaran Kementerian Pertahanan dilakukan secara tertutup, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui urgensi dan tujuan dari peningkatan anggaran tersebut.

Dalam upaya menciptakan *good governance*, hal ini menjadi suatu hal yang penting. Pemerintah harus mengutamakan prinsip-prinsip dalam soal akuntabilitas dan partisipasi dari masyarakat. Salah satu cara yang dapat mendukung upaya transparansi *budget government* untuk menciptakan pembangunan program stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara adalah *e-budgeting*. Hal-hal soal keterbukaan ini menjadi hal yang cukup berbahaya, karena tidak terciptanya proses penganggaran yang akuntabel dan transparan yang dilakukan oleh DPR.

Jika dihubungkan dengan konteks *promiscuous powersharing*, kondisi ini terlihat adanya dampak dari pembagian kekuasaan eksekutif kepada hampir semua partai politik tanpa memperhitungkan afiliasi politiknya yang bertujuan tercapainya keseimbangan politik, menyingkirkan kontestasi dan persaingan politik secara terbuka, bahkan untuk mencapai kemenangan tertentu dalam Pemilu. Pembentukan rezim yang otoriter bisa saja terjadi, bahkan demokrasi Indonesia bisa berjalan mundur apabila hal-hal tersebut terus dilakukan oleh elit-elit politik secara tidak bertanggung jawab (Legowo et al., 2013)

Peneliti menemukan bahwa teori *promiscuous powersharing* masih belum mampu dalam mengkaji langkah-langkah yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dalam membuat kebijakan Kementerian Pertahanan, karena Prabowo menggunakan sumber daya negara untuk menjalankan partainya, namun menggunakan sumber daya negara untuk kepentingan pencapresan di tahun 2024 mendatang. Hal ini menjadi temuan, karena praktik *promiscuous powersharing* yang dilakukan oleh Prabowo Subianto merupakan jenis *promiscuous powersharing* yang positif. Peneliti menggunakan istilah *promiscuous powersharing* positif karena Prabowo Subianto menggunakan isu anggaran Kementerian Pertahanan untuk menjaga reputasi dan meningkatkan elektabilitasnya dan untuk menghidupkan dan menjalankan roda kepartaian.

Komponen Cadangan sebagai bentuk *Promiscuous Powersharing*

Salah satu kebijakan Kementerian Pertahanan di masa kepemimpinan Prabowo Subianto yang cukup menarik perhatian dari publik adalah kebijakan komcad. Komcad merupakan salah satu program sukarela yang memiliki dasar Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Komcad dipersiapkan untuk dapat dimanfaatkan ketika negara mengalami kondisi darurat militer atau bencana alam. Berdasarkan aturan yang berlaku, Komcad hanya dapat dimobilisasi oleh Presiden atas persetujuan DPR RI guna kepentingan pertahanan negara. Urgensi dari dibentuknya Komcad adalah sebagai implementasi dari Doktrin Pertahanan yang diwarisi oleh pendiri bangsa, yaitu Pertahanan Rakyat Semesta. Adanya kebutuhan untuk mempersiapkan pertahanan negara yang kuat dalam mengantisipasi dinamika dan ancaman geopolitik terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi urgensi dalam pembentukan Komcad.

Selain untuk mengantisipasi dinamika dan ancaman geopolitik dunia, komcad dibentuk guna penghematan belanja sumber daya manusia (SDM) militer di masa damai. Ini karena pada masa personel komcad tidak aktif, para personel akan dikembalikan kepada profesi dan aktivitasnya masing-masing sebagai warga sipil, sehingga negara tidak perlu mengeluarkan biaya rutin untuk kesejahteraan para personel. Dalam program ini negara hanya mengeluarkan anggaran ketika para personel Komcad mengikuti latihan dasar kemiliteran selama tiga bulan dan pelatihan penyegaran untuk memelihara keterampilan tempur.

Setiap warga negara yang memiliki usia 18-35 tahun dengan latar belakang apa saja yang memenuhi persyaratan dapat secara sukarela mendaftar sebagai anggota komcad. Setelah dinyatakan lulus dalam seleksi, maka akan dilatih di pusat-pusat pelatihan milik TNI, baik TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU untuk mendapatkan pelatihan militer dasar selama tiga bulan. Selama pelatihan, negara akan memberikan uang saku, jaminan asuransi, dan kebutuhan lainnya

Selama mengikuti pelatihan, calon personel Komcad tetap mendapatkan haknya dari instansi dimana mereka bekerja dan apabila seorang mahasiswa akan tetap memperoleh haknya sebagai mahasiswa. Personel komcad memiliki masa bakti hingga usia 48 tahun. Dalam menjaga konsistensi dan kemampuan dari personel komcad, maka dilaksanakan dengan pelatihan

penyegaran yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Masa pelatihan penyegaran dilakukan paling singkat 12 hari dan paling lama 90 hari.

Pada tahun 2021, Jokowi menetapkan Komcad sebanyak 3.103 orang yang terbagi atas Rindam Jaya 500 sebanyak orang, Rindam III Siliwangi sebanyak 500 orang, Rindam XII Tanjungpura sebanyak 499 orang, dan Universitas Pertahanan sebanyak 604 orang (Kompas.com, 2021). Penetapan komcad dilakukan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat. Untuk Tahun Anggaran (TA) 2022, jumlah Komcad yang ditetapkan sebanyak 2.974 orang. Jumlah Komcad TA.2022 terbagi atas lima batalyon, yaitu Rindam II Sriwijaya sebanyak 450 orang, Rindam VI Mulawarman sebanyak 500 orang, Rindam XIV Hasanuddin sebanyak 500 orang, Komando Pendidikan Marinir (Kodikmar) TNI AL sebanyak 499 orang, Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU sebanyak 500 orang, dan Pusat Pendidikan Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) sebanyak 50 orang (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2022). Jika ditotal secara keseluruhan jumlah personel Komcad TA. 2021-2022 sebanyak 6.077 orang .

Pada awal pembentukannya, Komcad pada tahun 2021 ditargetkan memiliki 35 batalyon yang terdiri dari 25 ribu personel yang akan ditugaskan untuk membantu Markas Besar (Mabes) TNI. Jumlah personel ini dikalkulasi dengan asumsi setiap batalyon memiliki 400 hingga 500 personel Komcad. Selain itu Kementerian Pertahanan juga merencanakan pada tahun-tahun berikutnya perekrutan Komcad akan dihitung ulang sesuai dengan kebutuhan masing-masing matra, yaitu TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Target dan rencana yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertahanan ternyata tidak sesuai, karena adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada kondisi keuangan negara.

Pembentukan institusi yang bernama Komcad menimbulkan banyak kritik dari berbagai elemen masyarakat. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Diandra Meko dalam diskusi daring yang bertajuk “Kritik Pembentukan Komponen Cadangan” yang diselenggarakan oleh Imparsial mengkritik pembentukan komcad karena terjadi ambiguitas tujuan dari Komcad. Ambiguitas ini terdapat dalam Pasal 29 UU PSDN, dimana Komcad bertujuan untuk menghadapi ancaman hibrida. Secara regulasi, belum ada definisi yang jelas dalam menjelaskan ancaman hibrida. Aturan mengenai Komcad ini akan menjadi pasal karet karena tidak adanya definisi yang menjelaskan operasional yang jelas (Balairungpress, 2021).

Perdebatan lainnya adalah Komcad dianggap tidak efektif dalam efektif karena berdasarkan pengalaman yang terjadi di beberapa negara di dunia, seperti perang Rusia dan Ukraina, yang terjadi adalah penggunaan senjata jarak jauh seperti rudal dan *drone* menjadi alat yang efektif ketimbang pasukan infanteri. Pengalaman ini yang tidak dapat ditangkap oleh Prabowo Subianto sebagai Menhan. Pembentukan Komcad ini berpotensi menciptakan militerisasi pada masyarakat sipil dan ini sangat berbahaya bagi sebuah negara demokrasi.

Koalisi Masyarakat Sipil juga pernah melakukan gugatan uji materi tentang UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang mengatur soal Komcad ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasan dari gugatan terhadap UU PSDN ini adalah pembentukan komcad hanya sebagai dalih untuk menghadapi ancaman yang terjadi di dalam negeri, seperti ancaman bahaya komunisme, terorisme, dan konflik dalam negeri yang memiliki potensi untuk terjadinya konflik horizontal di masyarakat. Selain itu koalisi ini juga melihat adanya potensi untuk mengancam hak konstitusional warga negara dan mengganggu kehidupan demokrasi yang menjadi masalah fundamental di Indonesia. Namun gugatan uji materi UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN yang mengatur soal komcad ditolak oleh MK (CNN Indonesia, 2022). MK menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon tentang pasal 75 dan 79 UU PSDN kabur dan permohonan selain dua pasal itu dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam konteks *promiscuous powersharing*, penting untuk melihat alasan dibalik pembentukan komcad secara kritis. Berdasarkan kritikan yang diberikan oleh elemen masyarakat, Komcad sesungguhnya tidak terlalu penting untuk Indonesia saat ini. Komcad yang dibentuk oleh Menhan Prabowo Subianto tidak hanya dimaksudkan untuk mempersiapkan pertahanan dan

keamanan semata, namun Komcad dapat digunakan sebagai mobilisasi massa yang besar terhadap Pemilu 2024, mengingat Komcad terdiri dari masyarakat sipil yang masih memiliki hak memilih. Jika diasumsikan jumlah komcad yang ditetapkan setiap tahun berjumlah 3.000 personil, maka dari tahun 2021 hingga 2024 Kementerian Pertahanan akan memiliki sejumlah 12.000 personil komcad dan ini berpotensi menjadi suara dalam Pemilu 2024. Perhitungan ini belum termasuk keluarga dan kerabat yang dimiliki oleh setiap personil Komcad. Tentu pembentukan Komcad yang diinisiasi oleh Prabowo Subianto akan mudah menjadi sumber suara dalam Pilpres 2024.

Selain itu, doktrin militer yang harus taat terhadap atasan yang menjadi bentuk loyalitas terhadap atasan dapat memberikan kemungkinan adanya dukungan yang kuat kepada Prabowo Subianto dan Partai Gerindra. Ini memungkinkan karena Prabowo Subianto yang menginisiasikan dan pada masa Prabowo Subianto sebagai Menhanlah Komcad dibentuk, sehingga para personil Komcad yang memiliki hak suara dalam pemilu akan memiliki kecenderungan untuk mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres tahun 2024. Komcad juga kemungkinan akan memiliki efek terhadap suara Partai Gerindra, karena selain sebagai Menhan, Prabowo Subianto juga menjabat sebagai ketua umum Partai Gerindra. Dengan adanya kemungkinan mobilisasi melalui Komcad yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024, ini merupakan bentuk *promiscuous powersharing* positif, dimana terjadi pembagian kekuasaan yang tanpa moral yang berakibat pada diuntungkannya individu maupun kelompok yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024.

Minimum Essential Force sebagai bentuk Promiscuous Powersharing

MEF merupakan kekuatan pokok minimum yang menjadi acuan dalam pembangunan bidang pertahanan keamanan telah ditetapkan dalam RPJMN 2019-2024 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Untuk mewujudkan suatu kekuatan pokok minimum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama. Prioritas dalam program pemenuhan capaian MEF mengacu pada ancaman aktual dan potensial bagi Indonesia serta kebijakan pemerintah dalam membangun Indonesia dengan mengutamakan wilayah terluar, yaitu daerah perbatasan. MEF terbagi menjadi 3 tahap, yaitu MEF tahap I tahun 2010 hingga tahun 2014, MEF tahap II tahun 2015 hingga tahun 2019, dan MEF tahap III tahun 2020 hingga tahun 2024.

Pencapaian Kementerian Pertahanan aspek fisik bidang alutsista dalam rangka pemenuhan MEF menunjukkan tren kenaikan dari tahap ke tahap. Pencapaian aspek fisik bidang alutsista MEF tahap I menunjukkan hasil presentase sebesar 57,24% dari target awal sebesar 54,97%. Peningkatan capaian MEF tahap I dipengaruhi salah satunya dengan pembelian tank Main Battle Tank (MBT) Leopard varian Leopard 2A4 yang dibeli dalam kondisi bekas dari Jerman pada Desember 2012. Pembelian MBT Leopard merupakan bagian dari pengadaan 153 unit tank dengan nilai US\$ 280 juta (Tempo.co, 2014). Alutsista lain yang datang pada periode MEF tahap I adalah 18 unit meriam KH-179 Howitzer 155 mm, 12 unit pesawat latih EMB-314 Super Tucano, 8 unit pesawat jet tempur F-16 blok 52, 5 unit pesawat angkut sedang CN-295, 3 kapal perang Korvet Bung Tomo Class, dan berbagai alutsista lainnya.

Capaian MEF aspek fisik bidang alutsista pada tahap II menunjukkan hasil presentase sebesar 63,19% dari target sebesar 75,54%. Peningkatan nilai MEF pada tahap II dipengaruhi dengan adanya program pengadaan alutsista multi years yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, alutsista yang mencapai tahap penyelesaian dan diserahkan kepada pengguna, yaitu kapal selam kelas Chang Bogo hasil kerjasama PT PAL (Persero) dan Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd (DSME) Korea Selatan yang diberi nama KRI Alugoro 405. Selain kapal selam, Kementerian Pertahanan pada MEF tahap II juga membeli dua baterai National Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS) 2 dari Kongsberg Group, Norwegia pada tahun 2017. NASAMS 2 saat ini ditempatkan di Satuan Peluru Kendali Pertahanan Udara (Satrudal) 111 TNI Angkatan Udara untuk melindungi Ibukota Jakarta dari serangan udara (Indomiliter, 2021).

MEF tahap III aspek fisik bidang alutsista memiliki target 100%. Dalam mencapai target ini, Kementerian Pertahanan telah melakukan berbagai kebijakan pertahanan yang beberapa contohnya adalah pembelian alutsista dan modernisasi alutsista. Dalam hal pembelian alutsista, pada MEF tahap III aspek fisik bidang alutsista, Kementerian Pertahanan pada tahun 2021 telah membeli lima pesawat C-130J Super Hercules dari Lockheed Martin, Amerika Serikat (Teniwut, 2022). Selain itu Kementerian Pertahanan juga telah menandatangani kontrak efektif pembelian dua pesawat angkut Airbus A400M yang diproduksi oleh perusahaan Perancis, Airbus. Kementerian Pertahanan juga melakukan modernisasi pesawat tempur F-16. Pengadaan ini dilakukan melalui program *Falcon Star Enhanced Mid Life Update* (EMLU). Tidak hanya memodernisasi pesawat tempur F-16, dalam program EMLU juga terdapat pelatihan personel TNI AU dari teknisi ahli dari perusahaan Lockheed Martin yang berasal dari Amerika Serikat.

Pada masa kepemimpinan Prabowo Subianto, Kementerian Pertahanan telah mengakusisi beberapa alutsista terbaru yang diawali dengan melakukan kontrak dengan perusahaan maupun negara produsen. Prabowo Subianto melakukan tanda tangan kontrak pertama dengan perwakilan dari perusahaan Dassault Aviation asal Perancis untuk pembelian enam pesawat tempur Dassault Rafale pada 10 Februari Tahun 2022 di Jakarta (Kompas.com, 2022). Pada saat yang bersamaan, PT. PAL Indonesia juga menandatangani kerjasama pada bidang penelitian dan pengembangan kapal selam dengan NAVAL Group dari Perancis. Kedepannya kontrak tersebut akan bermuara pada pembelian kapal selam Scorpene (PAL.co.id, 2022).

Data diatas menunjukkan bahwa Prabowo Subianto dan Kementerian Pertahanan memberikan perhatian yang besar terhadap target yang ada dalam MEF. Tentu sebagai peneliti ilmu politik, penulis tidak hanya melihat bahwa MEF merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka pertahanan dan keamanan negara, namun adanya kepentingan dibalik kebijakan ini. Jika kembali ke sejarah, Prabowo Subianto merupakan seorang jenderal yang memiliki prestasi mentereng dimana pernah menempati posisi-posisi strategis di tubuh TNI. Namun pada akhir masa kedinasannya di TNI, Prabowo Subianto menjadi sosok yang kontroversial sehingga diberhentikan oleh Presiden Habibie melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/ABRI/1998. Akibat dari pemberhentian ini terjadi keretakan hubungan antara Prabowo Subianto dan para jenderal yang ada di tubuh ABRI, seperti Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono, Subagyo H.S., Fachrul Razi dan beberapa jenderal lainnya.

Saat menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto mencoba menggunakan kesempatan ini untuk mengembalikan citranya yang sudah tercoreng akibat peristiwa yang terjadi di tahun 1998. Hal ini dilakukannya dengan berusaha mencapai target-target MEF yang sudah disusun oleh Kementerian Pertahanan sehingga hubungan antara Prabowo Subianto dan TNI kembali membaik pasca diberhentikan dari ABRI tahun 1998 yang membuat Prabowo Subianto dan TNI meregang. Isu pemberhentian Prabowo Subianto yang terus bergulir dan dilambungkan pada saat Pilpres 2014 dan 2019 juga merupakan salah satu faktor yang membuat Prabowo Subianto ingin menghapuskan rekam jeaknya yang buruk di TNI.

Jika dikaitkan dengan Pilpres, isu pemberhentian Prabowo Subianto menjadi isu yang sangat sering dan menjadi "senjata" andalan bagi kelompok yang berseberangan dengan Prabowo Subianto. Hal ini berdasarkan pengalaman-pengalaman pada Pilpres sebelumnya di tahun 2014 dan 2019. Untuk mempersiapkan dirinya sebagai calon presiden di Pilpres tahun 2024, Prabowo Subianto melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat menguntungkan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 seperti pencapaian MEF. Dengan adanya MEF, Prabowo Subianto kemungkinan akan mendapatkan keuntungan secara elektabilitas karena kebijakan ini dapat dijadikan prestasi oleh Prabowo Subianto dalam kampanye Pilpres 2024. Dalam konteks *promiscuous powersharing* ini dapat dikatakan sebagai bentuk *promiscuous powersharing* negatif karena adanya kepentingan untuk mereduksi hingga menghapus rekam jejak buruk yang terjadi di masa lalu dan digunakan untuk kepentingan Pilpres tahun 2024.

Diplomasi Pertahanan sebagai bentuk *Promiscuous Powersharing*

Prabowo Subianto menjadi salah satu menteri yang cukup sering melakukan kunjungan

kerja ke beberapa negara di dunia. Total selama 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto sudah mengunjungi delapan negara. Kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh Prabowo Subianto merupakan implementasi dari arahan Presiden Joko Widodo dalam melakukan diplomasi pertahanan guna mencegah konflik antar negara.

Dua bulan setelah pelantikan sebagai Menhan, Prabowo Subianto melakukan kunjungan perdana ke Malaysia pada 14 November 2019 (KumparanNews, 2020). Di Malaysia, Prabowo Subianto bertemu dengan Menhan Malaysia Mat Sabu dan melakukan agenda dan pembahasan terkait kerjasama pertahanan, yang salah satu agendanya adalah rencana pengiriman personel TNI ke Malaysia. Setelah berkunjung ke Malaysia, Prabowo Subianto menghadiri ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) Plus di Bangkok, Thailand pada 17 November 2019. Setelah menghadiri ADMM Plus di Bangkok, Thailand, Prabowo Subianto kembali bertolak ke Turkiye pada 27-29 November 2019. Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan dan Menhan Hulusi Akar.

Pada bulan Desember 2019, Prabowo Subianto mengunjungi tiga negara sekaligus, yaitu Tiongkok, Jepang, dan Filipina. Di Tiongkok, Prabowo Subianto melakukan penguatan kerjasama pertahanan kedua negara yang salah satunya adalah alih teknologi alutsista. Usai berkunjung ke Tiongkok, pada 20 Desember 2019, Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Jepang dan bertemu dengan Menhan Jepang dalam rangka membahas kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Jepang.

Awal tahun 2020, Prabowo Subianto melakukan kunjungan luar negeri ke Paris Perancis. Dalam kunjungan ini, Prabowo Subianto mengadakan pertemuan bilateral dengan Menhan Perancis Florence Parly dan pertemuan ini merupakan pertemuan pertama dalam mengawali rangkaian kegiatan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Perancis. Selain Perancis, Prabowo Subianto juga mengunjungi Rusia selama dua kali, yaitu pada tanggal 28 Januari dan 23 Juni 2020. Pertemuan pertama mencapai kesepakatan antara Indonesia dan Rusia untuk meningkatkan hubungan kerja sama di bidang pertahanan dan teknik militer. Pada Oktober 2020, Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat dan bertemu dengan Menhan Mark. T. Esper. Pertemuan ini beragendakan lanjutan kerja sama bilateral bidang pertahanan. Kunjungan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat ini menjadi penanda berakhirnya pencegahan Prabowo Subianto yang dicekal masuk ke Amerika Serikat selama 20 Tahun. Kurang dari satu bulan kemudian, Prabowo Subianto kembali mengunjungi Amerika Serikat. Pada kunjungan Prabowo Subianto yang kedua disambut oleh Pelaksana Tugas (Plt) Menhan Amerika Serikat, Christopher Miller.

Diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto ternyata tidak hanya dilakukan untuk kepentingan pertahanan Indonesia, tetapi jika dilihat lebih lanjut memiliki keterkaitan dengan kepentingan pribadi Prabowo Subianto. Kepentingan Prabowo Subianto yang diakomodir oleh adanya diplomasi pertahanan ini adalah terkait branding diri yang dilakukan Prabowo Subianto menuju kontestasi Pilpres 2024. Salah satu yang unik adalah bagaimana Prabowo Subianto pada saat menjadi menhan dapat masuk ke Amerika Serikat walaupun selama hampir 20 tahun Prabowo Subianto dicekal untuk masuk ke Amerika Serikat akibat pelanggaran HAM yang terjadi di masa Orde Baru. Ini tentu dapat dijadikan oleh Prabowo Subianto untuk menghilangkan rekam jeaknya yang buruk pada masa lalu terkait dengan pelanggaran HAM.

Selain usaha untuk menghilangkan rekam jeak buruk yang terjadi di masa lalu, Prabowo Subianto mencoba untuk memperkenalkan dirinya di dunia internasional dengan melakukan kunjungan ke berbagai negara. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Prabowo Subianto tidak hanya bertemu dengan Panglima maupun menhan negara lain, namun juga bertemu dengan presiden negara-negara yang dikunjungi. Salah satu contoh presiden yang bertemu dengan Prabowo Subianto adalah Recep Tayyip Erdogan, saat lawatan Prabowo Subianto ke Turkiye. Recep Tayyip Erdogan sebagai Presiden Turkiye memiliki pengaruh yang cukup besar di dunia internasional dan memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini menjadi penting bagi Prabowo Subianto tentunya sebagai bentuk meningkatkan branding politiknya di dunia internasional untuk persiapan pencapresannya pada Pilpres 2024. Selain itu,

Prabowo Subianto dengan melakukan diplomasi pertahanan dapat menunjukkan dirinya bahwa Prabowo Subianto disegani dan diterima oleh dunia internasional yang tentunya dapat digunakan sebagai kampanye pada Pilpres 2024.

Kebijakan diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto ini pernah mendapat kritikan dari salah satu partai oposisi. Fraksi itu adalah fraksi PKS, dimana melalui Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Mardani Ali Sera mengkritik Prabowo Subianto yang beberapa kali melakukan kunjungan kerja ke luar negeri (CNN Indonesia, 2020). PKS mengkritik karena adanya pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2019. Dalam pidato tersebut Presiden Joko Widodo mengingatkan agar para pejabat untuk meminimalkan kunjungan ke luar negeri. Kritikan yang dilakukan oleh PKS disambut dengan pembelaan yang dilakukan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang menyampaikan bahwa kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh Prabowo Subianto bukanlah kehendak dari Prabowo Subianto sendiri. Partai Gerindra juga mengingatkan agar PKS jangan “genit” terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto.

Dengan adanya kebijakan diplomasi pertahanan dan dengan adanya kritikan yang dilontarkan oleh pihak oposisi, semakin meyakinkan bagi peneliti bahwa kebijakan diplomasi pertahanan merupakan kebijakan yang sarat akan kepentingan politik. Kepentingan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 membuat praktik *promiscuous powersharing* dalam kebijakan ini adalah jenis *promiscuous powersharing* negatif karena Prabowo Subianto mencoba untuk mereduksi rekam jejaknya yang kelam dengan melakukan kunjungan ke luar negeri, sehingga Prabowo Subianto dengan mudah mendapatkan citra baik pada saat kampanye Pilpres 2024 mendatang.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Kementerian Pertahanan dibawah pimpinan Menhan Prabowo Subianto dipengaruhi oleh pemberian kekuasaan yang bebas. Dimana Presiden Joko Widodo memberikan kekuasaan kepada Prabowo Subianto dalam bentuk anggaran, komponen cadangan yang besar, pembelian alutsista, dan diplomasi pertahanan. Tentu dalam konteks demokrasi yang dilihat dari teori *promiscuous powersharing* yang dikemukakan Dan Slater, dimana pemberian kekuasaan kepada pihak oposisi sangat menciderai demokrasi Indonesia, karena dari pemberian kekuasaan tersebut akan menimbulkan kartelisasi partai. Penghisapan terhadap sumber daya negara yang diakibatkan oleh *promiscuous powersharing* juga terjadi.

Kebijakan seperti anggaran Kementerian Pertahanan yang besar dan munculnya intitusi komcad sarat akan kepentingan politik Prabowo Subianto dan Partai Gerindra dalam Pilpres 2024 mendatang. Hal ini terlihat karena adanya usaha Prabowo Subianto untuk menjadikan anggaran Kementerian Pertahanan yang besar menjadi sebuah prestasi yang layak dijadikan sebagai bahan dalam kampanye Pilpres 2024. Institusi komcad yang dibuat oleh Prabowo Subianto juga merupakan upaya untuk memobilisasi massa untuk kepentingan Pilpres 2024 mendatang. Kebijakan anggaran Kementerian Pertahanan dan pembentukan komcad merupakan bentuk *promiscuous powersharing* positif.

Kebijakan Kementerian Pertahanan, yaitu MEF dan diplomasi pertahanan merupakan bentuk dari *promiscuous powersharing* negatif. Hal ini karena Prabowo Subianto melalui dua kebijakan tersebut mencoba untuk mereduksi dan menghilangkan rekam jejak yang buruk di masa lalu, terutama persoalan pelanggaran HAM. Tentu yang dilakukan oleh Prabowo Subianto ini menjadi usahanya dalam membangun kembali citranya di masyarakat yang sempat tercoreng akibat adanya isu pelanggaran HAM seperti yang terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019 yang terus didengungkan oleh lawan politik Prabowo Subianto.

Sebagai kementerian yang memiliki pagu anggaran yang terbesar diantara kementerian/lembaga lainnya, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan masyarakat yang diwakili oleh DPR. Para pemangku kebijakan harus mempertimbangkan aspek demokrasi

dalam menentukan kebijakan pertahanan disamping aspek pertahanan dan keamanan negara. Prabowo Subianto diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat dan terukur sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustang. (2023). Analisis Formulasi Kebijakan (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD Kab. Wajo). *Inspirasi & Strategi (INSPIRAT): Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis*, 14(1), 27–33. www.ejournal.isha.or.id/index.php/Inspirat
- APBN 2022. (2022).
- Balairungpress. (2021, February 6). Banjir Kritikan Rencana Pembentukan Komponen Cadangan. *Balairungpress*. <https://www.balairungpress.com/2021/02/banjir-kritik-rencana-pembentukan-komponen-cadangan/>
- CNN Indonesia. (2019, July 15). JK Sebut Pertemuan Jokowi Dan Prabowo Damaikan Politik Bangsa. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190715122503-32-412187/jk-sebut-pertemuan-jokowi-dan-prabowo-damaikan-politik-bangsa>
- CNN Indonesia. (2020, January 17). PKS Kritik Prabowo Sering Ke Luar Negeri. *Cnnindonesia.Com*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200117153323-20-466338/pks-kritik-prabowo-sering-ke-luar-negeri>
- CNN Indonesia. (2022, October 31). MK Tolak Gugatan UU PSDN, Sebab Komcad Dibutuhkan Negara. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221031125224-12-867476/mk-tolak-gugatan-uu-psdn-sebut-komcad-dibutuhkan-negara>
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Grzymala-Busse, A. M. (2007). *Rebuilding Leviathan: Party Competition And State Exploitation In Post-Communist Democracies*. Cambridge University Press.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1989). *Fourth Generation Evaluation*. London: Sage Publications.
- Hakim, M. A. L., Darmawan, C., & Anggraeni, L. (2022). Demokrasi Minim Oposisi: Narasi Maha Puitis Sejarah Atas Reduksi Oposisi. *Jurnal Education And Development*, 10(3), 647–683. <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.3732>
- Hannan, A., & Busahwi. (2021). Problem Politik Kabinet Koalisi; Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik. *Kabilah: Journal Of Social Community*, 6(2).
- Harahap, M., Nadya, R., Sitanggang, W., & Jamaludin. (2023). Elit Politik Di Indonesia: Akar Dan Dampak Penyalahgunaan Hak Berdemokrasi. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(06), 2149–2160. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i06.1023>
- Indomiliter. (2021, November 27). Lindungi Ibu Kota, Satrudal 111 “NASAMS” Teluk Naga Resmi Beroperasi. *Indomiliter.Com*. <https://www.indomiliter.com/lindungi-ibu-kota-satrudal-111-nasams-teluk-naga-resmi-beroperasi/>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022, September 8). Penetapan Komponen Cadangan TNI 2022, Menhan Prabowo: 2974 Orang Dilatih Di Masing-masing Matra. *Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*. <https://www.kemhan.go.id/2022/09/08/penetapan-komponen-cadangan-tni-2022-menhan-prabowo-2-974-orang-dilatih-di-masing-masing-matra.html>
- Kompas.com. (2021, October 7). Jokowi Tetapkan 3.103 Orang Komponen Cadangan 2021. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/07/09313191/jokowi-tetapkan-3103-orang-komponen-cadangan-2021>
- Kompas.com. (2022, February 18). Deretan Alutsista Yang Dibeli Prabowo Sejak Menjabat Menhan, Pesawat Rafale Hingga Airbus A400M. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/18/14461571/deretan-alutsista-yang-dibeli-prabowo-sejak-menjabat-menhan-pesawat-rafale>
- KumparanNews. (2020, October 9). Sebelum Ke AS, Prabowo Sudah Kunjungi 8 Negara Sejak Jadi Menhan. *Kumparan.Com*. <https://kumparan.com/kumparannews/sebelum-ke-as-prabowo-sudah-kunjungi-8-negara-sejak-jadi-menhan-1uMA9HTBzr1/1>



- Legowo, S. H., Krisnadi, I. G., & Sumartono, H. (2013). Dinamika Politik Rezim Orde Baru Di Indonesia Studi Tentang Kegagalan Konsolidasi Politik Rezim Orde Baru Pada Tahun 1990-1996. *Publika Budaya*, 1(1).
- PAL.co.id. (2022, February 2). Gandeng Naval Group, PAL Siap Perkuat Pertahanan Maritim. *PAL.Co.Id*.
- Pepinsky, T. (2019, June 13). Pembelahan Agama Dan Etnis Dalam Pilpres 2019. *Tirto.Id*.
- Slater, D. (2018). Party Cartelization, Indonesian-Style: Presidential Power-Sharing And The Contingency Of Democratic Opposition. *Journal of East Asian Studies*, 18(1), 23–46. <https://doi.org/10.1017/jea.2017.26>
- Slater, D., & Simmons, E. (2012). Coping By Colluding: Political Uncertainty And Promiscuous Powersharing In Indonesia And Bolivia. *Comparative Political Studies*, 46(11), 1366–1393. <https://doi.org/10.1177/0010414012453447>
- Tempo.co. (2014, October 8). Mengenal Tank Leopard, Bintang Baru HUT TNI. *Tempo.Co*. <https://nasional.tempo.co/read/612754/mengenal-tank-leopard-bintang-baru-hut-tni>
- Teniwut, M. (2022, November 3). Ini Fakta Terbaru Pesawat C-130J Super Hercules Pesanan Indonesia. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/534665/ini-fakta-terbaru-pesawat-c-130j-super-hercules-pesanan-indonesia>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.